



Pengaruh Populasi, Upah Minimum, dan Human Capital Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung: Perspektif Ekonomi Islam

Adelia Safitri*, Fatih Fuadi, Liya Ermawati

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung
Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarama, Kec. Sukarama, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email: ^{1,*}adeliasafitri309@gmail.com, ²fatihfuadi@radenintan.ac.id, ³liyaermawati@radenintan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: adeliasafitri309@gmail.com

Submitted: 11/07/2025; Accepted: 02/08/2025; Published: 05/08/2025

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh populasi penduduk, upah minimum provinsi, dan human capital terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung tahun 2018-2024 dalam perspektif ekonomi Islam. Data yang digunakan merupakan data panel yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Fixed Effect Model (FEM) melalui perangkat lunak EViews 10. Berdasarkan hasil uji t dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa secara parsial populasi penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung, dengan nilai koefisien sebesar -0.057919 dan probabilitas 0.0011 ($< 0,05$). Upah minimum provinsi juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung, dengan nilai koefisien sebesar -3.121572 dan probabilitas 0.0032 ($< 0,05$). Sementara itu, human capital yang diukur melalui indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung dengan koefisien 3.972250 dan probabilitas 0.3727 ($> 0,05$). Secara simultan populasi penduduk, upah minimum provinsi, dan human capital berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung dengan nilai f-statistic sebesar 7.804487 dan probabilitas 0.0000 ($< 0,05$). Dalam perspektif ekonomi Islam, upaya penanggulangan pengangguran tidak hanya berfokus pada pencapaian indikator ekonomi semata, namun juga harus didukung oleh prinsip-prinsip keadilan sosial seperti pemerataan kesempatan kerja, dan pelatihan keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengangguran Terbuka; Populasi Penduduk; Upah Minimum; Human Capital; Perspektif Ekonomi Islam.

Abstract—This study aims to analyze the influence of population, provincial minimum wage, and human capital on the open unemployment rate in Lampung Province in 2018-2024 from an Islamic economic perspective. The data used are panel data sourced from the Central Statistics Agency (BPS), and analyzed using a quantitative approach with the Fixed Effect Model (FEM) method through EViews 10 software. Based on the results of the t-test in this study, it shows that partially the population has a negative and significant effect on the open unemployment rate in Lampung Province, with a coefficient value of -0.057919 and a probability of 0.0011 (< 0.05). The provincial minimum wage also has a negative and significant effect on the open unemployment rate in Lampung Province, with a coefficient value of -3.121572 and a probability of 0.0032 (< 0.05). Meanwhile, human capital as measured by the human development index does not have a significant effect on the open unemployment rate in Lampung Province with a coefficient of 3.972250 and a probability of 0.3727 (> 0.05). Simultaneously, population, provincial minimum wage, and human capital significantly influence the open unemployment rate in Lampung Province with an f-statistic value of 7.804487 and a probability of 0.0000 (< 0.05). From an Islamic economic perspective, efforts to overcome unemployment should not only focus on achieving economic indicators alone, but must also be supported by principles of social justice such as equal employment opportunities and skills training to create jobs and empower communities sustainably.

Keywords: Open Unemployment; Population; Minimum Wage; Human Capital; Islamic Economic Perspective.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada suatu wilayah, kota ataupun negara selalu diikuti dengan pertumbuhan jumlah penduduk, ketenagakerjaan, dan sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dalam suatu negara. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan dan memperluas kesempatan kerja agar pendapatan dapat terdistribusi secara merata. Namun, dalam realitasnya kerap terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan jumlah angkatan kerja, sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran (Siboro et al., 2025). Pada negara berkembang, terutama Indonesia tidak luput dari masalah pengangguran.

Sejatinya, tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan dan standar hidup masyarakat. Kondisi ini merupakan konsekuensi lantaran banyak tenaga kerja yang siap kerja tetapi tidak tertampung ke dalam lapangan kerja yang tersedia sehingga mengakibatkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022). Indonesia masih mengalami proses pembangunan ekonomi untuk mencapai suatu kesejahteraannya. Dalam proses pembangunan yang telah dilaksanakan kurang sanggup menyediakan kesempatan kerja kepada angkatan kerja yang meningkat begitu cepat sehingga terciptanya pengangguran. Pengangguran yang terjadi akan memberikan dampak terhadap kehidupan sosial yaitu tingkat kriminalitas dan kekerasan. Hal ini tentunya berpengaruh pada stabilitas dan kesejahteraan akan berkurang serta pembangunan ekonomi akan terhambat apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi (Cahyana & Muliati, 2023).



Dalam teori ekonomi makro klasik, salah satu pendekatan yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan fenomena pengangguran adalah Teori Keynesian. Menurut John Maynard Keynes, menyatakan bahwa pengangguran terjadi karena rendahnya permintaan agregat, bukan karena kurangnya produksi tetapi rendahnya konsumsi sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi (Qausar & Aminda, 2022). Dalam keadaan perekonomian yang tidak berkembang, permintaan akan barang dan jasa dalam masyarakat menurun yang mengakibatkan produksi perusahaan juga menurun. Kondisi ini menyebabkan banyak tenaga kerja tidak terpakai yang berakibat pada pengangguran. Keynes juga berpendapat bahwa campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan selama perekonomian diatur oleh kegiatan dipasar bebas yang akan berdampak pada kesempatan kerja. Namun mekanisme pasar bebas tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan atau campur tangan pemerintah. untuk menjaga permintaan agregat agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Misalnya melalui kebijakan fiskal dan investasi publik seperti peningkatan belanja publik dan pemberian subsidi guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja (Fahmi, 2022).

Menurut Muscahya Alim, menjelaskan bahwa pengangguran adalah masalah yang sangat kompleks karena dapat mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami (Syahnaztia, 2022). Pengangguran merupakan seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang di inginkannya (Azzahro & Prakoso, 2022). Pengangguran ini tercipta karena pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah dari pada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka adalah tingkat kuantitas pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam satuan persen (%) (Azzahro & Prakoso, 2022). Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang dialami tenaga kerja yang sungguh-sungguh belum mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini memang jenis pengangguran yang dapat di bilang cukup banyak, karena memang belum mendapatkan pekerjaan meskipun sudah berusaha dengan maksimal untuk mencari pekerjaan. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan penambahan tenaga kerja lebih tinggi dari pada pertumbuhan lapangan pekerjaan. Dampak dari situasi seperti ini mereka tidak melakukan suatu pekerjaan, jadi pengangguran yang dilihat itu sangat nyata, oleh karena itu disebut dengan pengangguran terbuka (Permadi & Chrystanto, 2021).

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah di Pulau Sumatera yang memiliki dinamika ketenagakerjaan yang cukup kompleks selama periode 2018–2024. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi meskipun jumlah penduduk usia kerja meningkat, upah minimum terus naik, dan pembangunan sumber daya manusia semakin diperkuat. Ketidaksesuaian antara pertumbuhan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja menjadi salah satu penyebab utama belum stabilnya angka pengangguran. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi ketenagakerjaan di wilayah ini, berikut disajikan data Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung berdasarkan kabupaten/kota selama tahun 2018 – 2024 :

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung Tahun 2018-2024

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Barat	2,74	1,66	2,13	2,83	2,1	2,25	2,09
Tanggamus	2,21	2,96	2,96	2,93	3,7	3,35	3,19
Lampung Selatan	4,49	4,68	5,19	5,27	5,31	4,95	4,84
Lampung Timur	3,8	2,87	2,64	3,05	3,3	3,09	3,02
Lampung Tengah	2,51	2,61	4,22	4,31	3,56	3,25	3,33
Lampung Utara	4,83	5,11	5,34	6,14	6,15	5,73	5,85
Way Kanan	4,42	3,59	3,56	3,36	3,28	3,07	3,27
Tulang Bawang	3,52	4,01	4,84	4,1	3,52	3,46	3,23
Pesawaran	4,63	4,41	4,64	4,19	5,06	4,76	4,36
Pringsewu	4,13	4,92	5,77	4,85	4,77	4,66	4,39
Mesuji	3,76	3,61	3,71	3,42	3,22	2,46	2,85
Tulang Bawang Barat	2,95	3,57	3,46	3,35	4,12	3,89	4,12
Pesisir Barat	1,87	3,25	3,41	3,08	3,73	3,47	3,04
Bandar Lampung	7,27	7,15	8,79	8,85	7,91	7,43	7,44
Metro	5,79	5,12	5,4	5	4,34	3,6	3,71
Provinsi Lampung	4,04	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23	4,19

Berdasarkan data yang telah disajikan pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi sepanjang periode 2018 hingga 2024. Secara umum, angka TPT meningkat tajam pada tahun 2020 dan 2021 yaitu saat terjadi pandemi COVID-19, dimana tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung pada tahun 2020 mencapai 4,67%, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 4,69%. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Kota Bandar Lampung, dengan TPT mencapai 8,79% pada 2020 dan masih relatif



tinggi di 2024 sebesar 7,44%. Sebaliknya, daerah dengan basis sektor pertanian seperti Pesisir Barat dan Lampung Barat cenderung memiliki TPT yang lebih rendah dan stabil, mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian memiliki daya serap tenaga kerja yang relatif lebih baik, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Disisi lain, fluktuasi TPT ini juga memperlihatkan bahwa meskipun upah minimum provinsi Lampung meningkat setiap tahun, dari Rp2.074.673 pada 2018 menjadi Rp2.716.497 pada 2024, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu menurunkan angka pengangguran secara signifikan.

Dalam pandangan Islam, menganggur adalah sesuatu yang buruk karena Islam selalu memberikan arahan untuk setiap individu muslim untuk bekerja, apalagi bekerja adalah salah satu tuntunan utama Islam untuk dilakukan dan diwujudkan. Islam juga selalu mendorong setiap individu muslim untuk bekerja dan juga memproduksi bahkan jika mereka mampu justru mereka yang di anjurkan untuk membuat lapangan pekerjaan. Karena pekerjaan dan juga lapangan pekerjaan adalah dua hal yang saling berhubungan erat tidak dapat dipisahkan, sehingga ketika seseorang dapat berinovasi menciptakan lapangan pekerjaan maka mereka mampu setidaknya mengurangi angka pengangguran yang ada (Maisyaroh, 2023). Menurut (Fuadi, 2022) menjelaskan bahwa aktivitas bisnis adalah bagian dari kewajiban keagamaan. Islam mengenal konsep persaudaraan dan keadilan sosial yang bisa dilakukan dengan cara berbagi keuntungan atau kemakmuran dengan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah SWT QS ; Ath-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُفَّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan” (Q.S Ath – Thalaq :7)

Islam juga selalu berusaha memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpelesek kejurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya, ada sebuah hadist yang mengatakan “kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran”. Namun kenyataannya, tingkat pengangguran di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim relatif tinggi (Doni et al., 2023). Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang buruknya pengangguran, baik individu, masyarakat ataupun negara, akan meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih serius. Walaupun Allah telah berjanji akan menanggung rezeki kita semua, namun hal itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. Syarat yang paling utama adalah kita harus berusaha untuk mencari rezeki yang dijanjikan itu, karena Allah SWT telah menciptakan suatu sistem yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang akan mendapatkan rezeki dan barang siapa yang berpangku tangan maka dia akan kehilangan rezeki. Artinya, ada suatu proses yang harus dilalui untuk mendapatkan rezeki tersebut.

Dalam konteks ini, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung adalah populasi penduduk. Populasi penduduk menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tingkat pengangguran terbuka. Semakin tinggi populasi penduduk, semakin besar pula persaingan dalam mencari pekerjaan. Dalam konteks ekonomi Islam, penduduk yang aktif bekerja dianggap sebagai sumber daya ekonomi yang penting, tetapi jika populasi penduduk melebihi kapasitas pasar tenaga kerja, maka tingkat pengangguran dapat meningkat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di beberapa provinsi mungkin tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduknya. Hal ini bisa mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran atau ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh penduduk dengan permintaan tenaga kerja di pasar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program yang tepat untuk mengatasi masalah pengangguran seiring dengan pertumbuhan populasi yang terjadi di Provinsi Lampung. Populasi penduduk yang besar jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Seperti halnya pengelolaan kependudukan dibidang ketenagakerjaan. Jumlah pengangguran yang cukup besar akan membuat masalah tersendiri di Indonesia. Tenaga kerja di Indonesia masih banyak yang berpendidikan SD dan SMP, sementara yang berpendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi masih sedikit. Angkatan kerja dapat menjadi ujung tombak dengan menjadi pembuat lapangan pekerjaan (job creator), sehingga pengurangan pengangguran tidak dapat hanya mengandalkan penciptaan lapangan pekerjaan melalui investasi swasta atau asing dan pemerintah (Marliana, 2022).

Tidak hanya populasi penduduk, upah minimum juga memiliki peranan penting dalam tingkat pengangguran terbuka. Upah minimum adalah gaji bulanan terendah yang mencakup upah pokok dan tunjangan tetap yang ditentukan oleh gubernur sebagai bentuk perlindungan (Purba et al., 2025). Dalam penelitian ini, upah minimum yang digunakan adalah upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (Nailufar et al., 2024).

Menurut teori permintaan tenaga kerja, jika upah meningkat maka permintaan terhadap tenaga kerja cenderung menurun. Oleh karena itu, saat upah meningkat maka pengangguran cenderung tidak menurun, bahkan bisa meningkat. Begitu sebaliknya, saat upah menurun maka permintaan akan tenaga kerja meningkat, sehingga saat upah turun maka pengangguran akan turun (Simanjuntak, 1998:90 dalam (Wibisono, 2020)). Sedangkan menurut Mankiw, kenaikan upah minimum dapat menyebabkan peningkatan pengangguran karena perusahaan akan membutuhkan lebih



sedikit tenaga kerja, terutama yang tidak terdidik dan tidak berpengalaman. Jika dilihat dari perspektif penawaran tenaga kerja, upah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Tingkat produktivitas, kualitas, dan waktu kerja karyawan biasanya menentukan besarnya upah yang ditawarkan suatu perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka yaitu Human Capital. Human capital merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang dimiliki seseorang, yang diperoleh melalui investasi yang spesifik dalam pendidikan, pelatihan dan pengalaman (self learning) sepanjang hidupnya, hal ini memungkinkan mereka untuk menyadari potensinya sebagai anggota masyarakat produktif (Hanim, 2023). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat modal manusia suatu wilayah, semakin besar peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Maka dari itu investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Pendidikan sebagai bagian dari modal manusia juga memiliki peran strategis dalam membuka akses terhadap lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Soesanto dalam penelitian (Hanif et al., 2020), pendidikan bagi individu yang berasal dari kalangan masyarakat miskin membuka kesempatan baru untuk memperoleh pekerjaan dengan hasil yang lebih baik.

Sedangkan teori pertumbuhan menjelaskan bahwa pentingnya meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas. Dengan melakukan investasi dalam pendidikan, diharapkan bahwa kualitas sumber daya manusia akan meningkat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan produktivitas kerja. Meningkatnya produktivitas dapat berdampak pada peluang kerja karena adanya penurunan biaya produksi per unit barang, sehingga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan penurunan pada tingkat pengangguran (Susilowati & Adianita, 2023)

Dalam penelitian ini, human capital diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup, standar hidup, dan tingkat pengetahuan (Mokodongan et al., 2025). Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kondisi perekonomian dan IPM dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran, karena kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja semakin baik, sehingga permintaan terhadap tenaga kerja meningkat (Garnella et al., 2020). Ketika tenaga kerja memiliki kesehatan yang optimal, pendidikan yang memadai, dan kehidupan yang layak, maka kualitas hasil pekerjaannya juga akan lebih baik. Sebaliknya, jika ketiga aspek tersebut kurang terpenuhi, maka kualitas pekerjaan yang dihasilkan cenderung rendah. Oleh karena itu, IPM dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai dan menyerap tenaga kerja, di mana semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, semakin kecil pula tingkat pengangguran yang terjadi (Jamaluddin et al., 2025)

Berdasarkan pengamatan pada penelitian di atas, penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pengangguran terbuka, khususnya yang berkaitan dengan populasi penduduk, upah minimum provinsi, dan human capital. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana populasi penduduk, upah minimum provinsi, dan human capital dapat berkontribusi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung selama periode 2018–2024. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami hubungan ketiga faktor tersebut dalam konteks ekonomi Islam. Serta memberikan wawasan mengenai pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan pengangguran secara adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang didalamnya terdapat angka mulai dari proses pengumpulan data sampai penafsirannya (Ali, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada penelitian ini dengan menganalisis pengaruh antar variabel.

2.2 Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh para peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perusahaan yang sudah disusun dan diolah dengan metode statistik (Sumilih et al., 2025). Data diperoleh melalui publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber lainnya.

2.3 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek wilayah yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian kuantitatif merujuk pada sekelompok individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi fokus penelitian (Sumilih et al., 2025). Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah data mengenai Populasi Penduduk,



Upah Minimum Provinsi, Human Capital yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik di Provinsi Lampung tahun 2018-2024.

2.4 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian (Amin et al., 2023). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan non probability sampling. Jenis non probability sampling yang digunakan adalah sampling jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel, jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Suriani & Jailani, 2023). Berdasarkan teknik tersebut, sampel dalam penelitian ini berjumlah 105 observasi.

2.5 Definisi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel penelitian yang terdiri dari variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas adalah variabel yang mempunyai kegunaan sebagai penyebab, pemberi pengaruh terhadap variabel terikat (dependent variable) (Seran, 2020). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Populasi Penduduk (X₁), Upah Minimum Provinsi (X₂), dan Human Capital (X₃). Sedangkan Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (Y). Tabel 2 berikut ini menyajikan indikator pengukuran dari variabel penelitian:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Populasi Penduduk (X ₁)	Populasi penduduk adalah menghitung semua penduduk tanpa memandang status hukum atau kewarganegaraan. Nilai yang ditampilkan adalah perkiraan tengah tahun (Mahendra et al., 2022).	Populasi Penduduk	Rasio (Ribu Jiwa)
Upah Minimum Provinsi (X ₂)	Upah Minimum Provinsi adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai jaring pengaman dan dijadikan acuan pengusaha untuk menentukan upah yang sesuai dari pekerja atau buruh yang bekerja diperusahaan mereka bekerja di perusahaannya (Juliani & Kusuma, 2025)	UMP	Rasio (Nominal)
Human Capital (X ₃)	Human Capital adalah akumulasi dari pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta karakteristik lainnya dari tenaga kerja yang terdapat dalam organisasi. Modal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas, kinerja, dan pencapaian tujuan strategis (Nazwa Akhaza Hani et al., 2025). Namun dalam penelitian ini menggunakan indikator IPM sebagai alat ukur.	IPM	Rasio (Indeks) 0-100)
Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)	Menurut Badan Pusat Statistik (2025) tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang dihitung dari penduduk usia kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja	TPT	Rasio Persen

2.7 Teknik Analisa Data

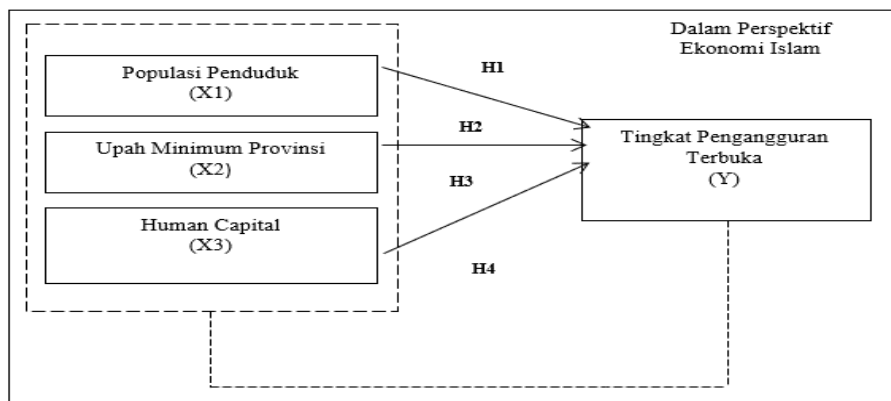
Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik regresi data panel yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (time series) dan data silang (cross section). Penelitian ini menggunakan aplikasi Eviews 10 sebagai alat dalam menganalisis data. Persamaan dasar regresi data panel adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

Berdasarkan persamaan dasar regresi data panel di atas, model ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (Y). Dalam model tersebut, α merupakan konstanta, sedangkan β_1 , β_2 , dan β_3 adalah koefisien dari masing-masing variabel independen, yaitu Populasi Penduduk (X₁), Upah Minimum Provinsi (X₂), dan Human Capital (X₃). Simbol ϵ menunjukkan komponen error (residual) yang mencerminkan pengaruh variabel-variabel lain di luar model yang tidak dimasukkan secara eksplisit. Selanjutnya, i menyatakan jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian, sedangkan t merupakan periode waktu penelitian, yaitu dari tahun 2018-2024.

2.8 Kerangka dan Hipotesis Penelitian

Kerangka teori menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas terdiri dari Populasi Penduduk, Upah Minimum Provinsi, dan Human Capital. Sementara itu, variabel terikatnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka kerangka pemikiran penelitian ini disusun sebagai berikut

**Gambar 1.** Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada Gambar 1, kerangka teori ini menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka (Y) dipengaruhi oleh populasi penduduk, upah minimum provinsi, dan human capital. Populasi penduduk (X1) yang tinggi tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat menyebabkan peningkatan pengangguran terbuka karena jumlah pencari kerja lebih besar dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Upah minimum provinsi (X2) berperan sebagai standar gaji minimum bagi pekerja, di mana kenaikan UMP dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja, namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas, perusahaan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang diserap, sehingga angka pengangguran meningkat. Sementara itu, human capital (X3) mencerminkan kualitas tenaga kerja berdasarkan pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Semakin tinggi kualitas human capital, semakin besar peluang seseorang mendapatkan pekerjaan yang layak, sedangkan rendahnya kualitas tenaga kerja dapat meningkatkan pengangguran terbuka karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Adapun hipotesis pada gambar kerangka berfikir diatas, maka dapat ditentukan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Populasi Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Teori Malthus, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Penelitian oleh (Al-faridzi et al., 2023), menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara. Berdasarkan dari teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa peningkatan populasi penduduk dapat membuat pengangguran meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka

2. Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan pada Teori Keynesian, pengangguran terjadi karena rendahnya permintaan agregat yang menyebabkan penurunan produksi dan kebutuhan tenaga kerja. Penurunan upah akan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan barang dan jasa berkurang dan pengangguran meningkat. Sebaliknya, kenaikan upah, khususnya upah minimum provinsi, meningkatkan pendapatan pekerja yang berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini mendorong kenaikan permintaan barang dan jasa, sehingga perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan tingkat pengangguran terbuka menjadi menurun. (Lasiyama, 2022). Dalam Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kurnia & Septiani, 2021), menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bregasmalang. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka

3. Pengaruh Human Capital Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan pada Teori Human Capital menurut Todaro, bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dan pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Rumatiga, 2020). Temuan ini mengonfirmasi hipotesis bahwa human capital berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan (Garnella et al., 2020) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Aceh. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Human capital berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka

4. Pengaruh Populasi Penduduk, Upah Minimum Provinsi, dan Human Capital Secara Simultan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka



H_4 : Populasi penduduk, upah minimum provinsi, dan human capital diduga berpengaruh bersama-sama secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengujian

3.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	PP	UMP	HC	TPT
Mean	8.149669	14.72248	4.235735	1.285195
Median	6.492073	14.70961	4.226250	1.269761
Maximum	14.06339	14.94808	4.371850	2.180417
Minimum	5.091908	14.54531	4.141228	0.506818
Std. Dev.	3.174030	0.094837	0.055283	0.363089
Skewness	0.881996	-0.223211	0.928799	0.214230
Kurtosis	1.988204	2.459084	3.403600	2.569271
Jarque-Bera	18.09238	2.151982	15.80934	1.614837
Probability	0.000118	0.340960	0.000369	0.446008
Sum	855.7153	1545.860	444.7522	134.9455
Sum Sq. Dev.	1047.745	0.935380	0.317846	13.71072
Observations	105	105	105	105

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 3, menunjukkan bahwa variabel X1 (Populasi Penduduk) memiliki nilai mean sebesar 8.149669, median sebesar 6.492073, nilai maksimum sebesar 14.06339, dan nilai minimum sebesar 5.091908. Nilai standar deviasi sebesar 3.174030 menunjukkan bahwa data memiliki sebaran yang cukup besar dari rata-ratanya. Variabel X2 (Upah Minimum Provinsi) memiliki nilai mean sebesar 14.72248, median sebesar 14.70961, nilai maksimum sebesar 14.94808, dan nilai minimum sebesar 14.54531 dengan standar deviasi sebesar 0.094837 yang menunjukkan bahwa data cukup homogen dan tidak tersebar jauh dari nilai tengahnya. Variabel X3 (Human Capital) memiliki nilai mean sebesar 4.235735, median sebesar 4.226250, nilai maksimum sebesar 4.371850, dan nilai minimum sebesar 4.141228, serta standar deviasi sebesar 0.055283 yang menandakan data sangat seragam dan tidak memiliki variasi besar. Sementara itu, variabel Y (Tingkat Pengangguran Terbuka) sebagai variabel dependen memiliki nilai mean sebesar 1.285195, median sebesar 1.269761, nilai maksimum sebesar 2.180417, dan nilai minimum sebesar 0.506818. Nilai standar deviasi sebesar 0.363089 menunjukkan bahwa data memiliki sebaran yang moderat di sekitar rata-ratanya.

3.1.2 Uji Model Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa uji untuk menentukan model terbaik yang digunakan dalam analisis data panel yaitu antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Oleh karena itu, untuk memilih uji model terbaik yang digunakan dalam mengelola data estimasi regresi data panel dalam penelitian ini, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yaitu :

Uji chow dilakukan untuk menentukan mana yang paling baik antara CEM atau FEM. Oleh karena itu, jika nilai prob Cross-section $F < 0,05$. Artinya model terpilih yaitu model FEM, Sebaliknya, jika nilai prob Cross-section $F > 0,05$ maka model terpilih adalah CEM (Nelmy Fitria Utami et al., 2025). Berikut tabel hasil uji chow dalam penelitian ini:

Tabel 4. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.855.811	-14,87	0.0000
Cross-section Chi-square	78.064.997	14	0.0000

Berdasarkan pada Tabel 4, hasil uji chow diperoleh dengan nilai probabilitas pada cross-section f dan cross-section chi-square yaitu sebesar 0,0000, jauh di bawah tingkat signifikansi umum ($< 0,05$). Oleh karena itu, model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM) merupakan model terbaik berdasarkan uji chow.



Uji hausman kemudian dilakukan untuk memilih apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Berikut tabel hasil uji hausman dalam penelitian ini :

Tabel 5. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.770.796	3	0,2256944

Berdasarkan pada Tabel 5, Uji Hausman menunjukkan hasil signifikan dengan nilai probabilitas pada cross-section random sebesar 0.0325 yang lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu ($< 0,05$). Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa FEM kembali terpilih sebagai model terbaik dalam uji ini. Oleh karena itu, uji LM tidak perlu dilakukan, karena uji ini hanya dilakukan jika model terbaik berada antara CEM dan REM.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap model regresi, termasuk uji chow dan uji hausman, maka model terbaik dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM) untuk menganalisis pengaruh populasi penduduk, upah minimum provinsi, dan human capital terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil estimasi menggunakan Fixed Effect Model (FEM), maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 30.8890986574 - 0.0579185755341 * X_1 - 3.12157224469 * X_2 + 3.97225005342 * X_3 + [CX=F] \quad (2)$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 30.8890986574 artinya, tanpa adanya variabel populasi penduduk, upah minimum provinsi, dan human capital maka tingkat pengangguran terbuka (Y) di Provinsi Lampung berada pada angka sebesar 30.8890986574.
2. Nilai koefisien beta variabel populasi penduduk (X_1) sebesar -0.0579185755341, artinya jika variabel lain konstan dan populasi penduduk meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat pengangguran terbuka (Y) akan menurun sebesar 0.0579185755341. Sebaliknya, jika populasi penduduk menurun, maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat sebesar 0.0579185755341
3. Nilai koefisien beta variabel upah minimum provinsi (X_2) sebesar -3.12157224469, artinya jika variabel lain konstan dan upah minimum provinsi meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat pengangguran terbuka (Y) akan menurun sebesar 3.12157224469. Sebaliknya, jika upah minimum provinsi menurun, maka tingkat pengangguran terbuka (Y) akan meningkat sebesar 3.12157224469.
4. Nilai koefisien beta variabel human capital (X_3) sebesar 3.97225005342, artinya jika variabel lain konstan dan human capital meningkat sebesar 1 satuan maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat sebesar 3.97225005342. Sebaliknya, jika human capital menurun, maka tingkat pengangguran terbuka (Y) akan menurun sebesar 3.97225005342

3.1.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, pengujian asumsi klasik yang dilakukan hanya mencakup uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hal ini didasarkan pada pendapat (Prawoto, 2017) yang menyatakan bahwa uji normalitas sebenarnya tidak termasuk dalam syarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), sehingga tidak semua pandangan menganggapnya wajib untuk dipenuhi. Selain itu, uji autokorelasi dinilai tidak relevan karena hanya digunakan pada data runtut waktu (time series), sedangkan penelitian ini menggunakan data panel.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menganalisis tingginya korelasi antar variabel bebas yang satu dengan variabel bebas lainnya melalui identifikasi besaran nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dapat dikatakan lolos uji multikolinieritas, apabila $VIF < 0,85$ yaitu berarti tidak ada multikolinieritas diantara variabel penelitian (Firdaus, 2021). Berikut hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini :

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	PP	UMP	HC
PP	1.000000	-0.758949	-0.105794
UMP	-0.758949	1.000000	0.292419
HC	-0.105794	0.292419	1.000000

Berdasarkan pada Tabel 6, hasil uji multikolinearitas tidak ditemukan indikasi adanya multikolinearitas karena seluruh nilai korelasi variabel independen berada di bawah 0,85 (Cynthia & Hanifa, 2024).

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji white. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini :

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.260.006	Prob. F(7,97)	1,9326389
Obs*R-squared	8.751.690	Prob. Chi-Square(7)	1,8819444
Scaled explained SS	7.400.244	Prob. Chi-Square(7)	2,6972222



Berdasarkan pada Tabel 7, hasil uji heteroskedastisitas menyatakan bahwa Prob Chi-Square pada Obs R Squared sebesar $0.2710 > 0,05$ maka mengindikasikan bahwa data tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

3.1.4 Uji Parsial (Uji t)

Uji t-statistik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.088.910	9.770.719	3.161.395	0.0022
PP	-0.057919	0.017185	-3.370.379	0.0011
UMP	-3.121.572	1.029.405	-3.032.404	0.0032
HC	3.972.250	4.433.410	0.895981	2,5881944

Berdasarkan pada Tabel 8, hasil regresi data panel dengan metode Fixed Effect Model (FEM), pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dianalisis melalui uji t. Hasil uji t pada variabel Populasi Penduduk (X1) menunjukkan nilai koefisien sebesar -0.057919 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0011, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ($< 0,05$). Maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel Populasi Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung. Selanjutnya, hasil uji t pada variabel Upah Minimum Provinsi (X2) menunjukkan nilai koefisien sebesar -3.121572 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0032, yang juga lebih kecil dari ($< 0,05$). Maka, H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung. Sedangkan pada variabel Human Capital (X3) yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diperoleh nilai koefisien sebesar 3.972250 dengan nilai probabilitas sebesar 0.3727, yang lebih besar dari ($> 0,05$). Maka, H_0 diterima dan H_3 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel human capital tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung.

3.1.5 Uji Simultan (Uji f)

Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji f dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Hasil Uji f

F-statistic	7.804487
Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan pada Tabel 9, Hasil uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi model, diperoleh nilai f-statistic sebesar 7.804487 dengan nilai probabilitas sebesar $0.000000 < 0,05$. Dengan demikian, bahwa variabel populasi penduduk, upah minimum provinsi, dan human capital secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung.

3.1.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dapat menunjukkan seberapa besar perubahan variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh perubahan variasi variabel bebas. Berikut hasil dari koefisien determinasi:

Tabel 10. Hasil Uji R^2

R-squared	0.603963
Adjusted R-squared	0.526576

Berdasarkan pada Tabel 10, koefisien determinasi (R-squared) digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai R-squared sebesar 0.603963. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 60,3963% variasi dalam tingkat pengangguran terbuka dapat dijelaskan oleh variabel populasi penduduk, upah minimum provinsi, dan human capital, sedangkan sisanya sebesar 39.6037% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Populasi Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil uji t bahwa variabel populasi penduduk (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Nilai koefisien sebesar -0.057919 dengan nilai probabilitas $0.0011 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya semakin besar populasi penduduk, maka tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun, hal ini terjadi karena peningkatan populasi diikuti oleh pertumbuhan angkatan kerja yang



lebih besar. Jika kapasitas daerah dalam menyerap tenaga kerja meningkat melalui pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru, maka penambahan populasi tidak meningkatkan pengangguran, melainkan menurunkannya. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mouren et al., 2022) yang menjelaskan bahwa ketika populasi penduduk meningkat maka akan ada persaingan setiap orang untuk lebih meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Selain itu, Semakin tinggi angka populasi penduduk maka semakin banyak tenaga kerja yang dihasilkan dan didukung juga dengan pemberdayaan sumber daya manusia dan mampu bersaing di lapangan kerja maka akan mampu mengurangi jumlah pengangguran.

Temuan ini juga didukung oleh Teori Demografi Ekonomi, yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk bisa berdampak positif apabila diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang memadai. Selain itu, Teori Lewis (Dual Sector Model) menjelaskan bahwa tenaga kerja dari sektor tradisional dapat beralih ke sektor modern ketika tersedia peluang kerja, sehingga populasi yang besar justru bisa menjadi potensi penggerak pembangunan ekonomi dan menurunkan pengangguran, jika dikelola secara optimal (Nugraha et al., 2023). Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan mengalami tekanan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Menurut (Saputri & Samsuddin, 2025), menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif tanpa diiringi dengan penciptaan lapangan kerja cenderung meningkatkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang terintegrasi, seperti peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja agar pertumbuhan penduduk dapat mendorong penurunan pengangguran.

3.2.2 Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa variabel upah minimum provinsi (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Nilai koefisien sebesar -3.121572 dan nilai probabilitas sebesar $0.0032 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurnia & Septiani, 2021) bahwa upah minimum kabupaten/kota mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bregasmalang, yang berarti semakin tinggi upah minimum maka tingkat pengangguran terbuka akan menurun. Kenaikan upah minimum mampu mengurangi pengangguran karena memberikan insentif bagi angkatan kerja untuk bekerja, sesuai dengan teori ekonomi klasik tentang fleksibilitas tingkat upah yang menyatakan bahwa peningkatan upah akan mendorong lebih banyak tenaga kerja untuk masuk ke pasar kerja karena adanya imbalan yang lebih tinggi sehingga pengangguran akan menurun (Tarigan & Arka, 2025).

Selain itu, menurut Teori Keynesian intervensi pemerintah seperti pengaturan upah minimum dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan permintaan agregat, yang pada akhirnya dapat membuka lebih banyak lapangan kerja. Artinya, kenaikan upah minimum di Provinsi Lampung tidak justru meningkatkan pengangguran, tetapi malah memberi efek positif terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya jika disertai dengan kebijakan pendukung yang memfasilitasi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengaturan upah minimum harus dijalankan secara hati-hati dan terintegrasi dengan upaya peningkatan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi penurunan pengangguran (Faizah & Woyanti, 2023).

3.2.3 Pengaruh Human Capital Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung

Dalam penelitian ini, human capital diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menunjukkan bahwa hasil uji t pada variabel human capital (X_3) memperoleh nilai koefisien sebesar 3.972250 dan nilai probabilitas sebesar $0.3727 > 0,05$, yang artinya H_0 diterima H_3 ditolak. Sehingga variabel human capital tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Margaretha et al., 2024), yang mengindikasikan bahwa peningkatan IPM belum mampu memberikan pengaruh yang nyata dalam menurunkan tingkat pengangguran. IPM yang terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak memang penting, namun belum tentu secara langsung menjawab persoalan ketenagakerjaan, terutama jika kualitas output pendidikannya tidak selaras dengan permintaan industri. Hal ini mungkin disebabkan oleh kualitas pendidikan atau kesehatan yang belum sepenuhnya merata atau relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Temuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan Teori Human Capital, yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia seharusnya berdampak positif terhadap produktivitas dan kesempatan kerja. Namun dalam konteks ini, peningkatan human capital yang diukur melalui IPM belum efektif dalam menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan industri, sehingga belum mampu mengurangi angka pengangguran secara signifikan (Puspasari, 2020). Namun, dalam konteks Provinsi Lampung, peningkatan IPM belum sepenuhnya efektif menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan kompetitif di pasar kerja modern. Oleh karena itu, selain peningkatan IPM, perlu ada intervensi pada peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja.

3.2.4 Pengaruh Populasi Penduduk, Upah Minimum Provinsi, dan Human Capital Secara Simultan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung



Berdasarkan hasil uji *f*, diperoleh nilai *f*-statistic sebesar 7.804487 dengan nilai probabilitas *f*-statistic sebesar 0.0000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Populasi Penduduk (*X*₁), Upah Minimum Provinsi (*X*₂), dan Human Capital (*X*₃) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung. Sehingga pemahaman ini menyatakan bahwa permasalahan pengangguran tidak bisa hanya dilihat dari satu faktor saja, melainkan perlu pendekatan multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia lainnya.

3.2.5 Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pengaruh Populasi Penduduk, Upah Minimum Provinsi, dan Human Capital Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran dan lapangan pekerjaan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Ketika tersedia banyak lapangan pekerjaan, maka angka pengangguran cenderung menurun, sebaliknya, ketika lapangan kerja semakin sempit, maka jumlah pengangguran akan meningkat. Pengangguran menjadi salah satu permasalahan utama yang dapat menghambat keberlangsungan pembangunan suatu negara, sebab tingginya tingkat pengangguran dapat menyebabkan turunnya produktivitas nasional dan ketimpangan sosial. (Hasanah & Imani, 2021). Dalam perspektif Islam, bekerja merupakan kewajiban bagi setiap individu yang memiliki kemampuan. Islam tidak hanya memandang pekerjaan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”. Konsepsi Islam tentang bekerja merupakan suatu kewajiban agama yang menyeluruh atas setiap muslim (bersifat individual) yang memiliki kemampuan untuk bekerja demi mencapai kebahagiaan individu, keluarga, dan masyarakat” (QS. Al-A'raf:10)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberikan manusia sarana dan kemampuan untuk bekerja serta mencari penghidupan. Oleh karena itu, Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset kejurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya, ada sebuah hadist yang mengatakan “kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran”. Namun kenyataannya, tingkat pengangguran di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim relatif tinggi. (Doni et al., 2023).

Menurut Qardhawi berpendapat bahwa pengangguran di bagi menjadi dua kelompok yaitu, Pertama, pengangguran jabariyah, yaitu mereka yang tidak memiliki pilihan selain menganggur karena faktor keterpaksaan, seperti tidak memiliki keterampilan atau akses terhadap pekerjaan. Kedua, pengangguran khiyariyah, yaitu mereka yang sejatinya mampu untuk bekerja namun memilih untuk bermalas-malasan dan berpangku tangan, sehingga menjadi beban bagi orang lain. (Anggraini et al., 2023)

Dalam hal ini, tingginya populasi penduduk tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat memperparah angka pengangguran. Dalam Islam, penduduk dianggap sebagai sumber daya yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Islam juga menekankan pentingnya pengendalian kependudukan untuk menghindari berbagai masalah sosial dan ekonomi yang dapat timbul dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Islam sangat memperhatikan aspek sumber daya manusia dengan menjadikan manusia atau penduduk sebagai khalifah di muka bumi dan menjadi pihak utama yang mengelola sumber daya alam yang telah Allah ciptakan (Harahap et al., 2021). Sebagaimana yang diartikan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 : "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi"

Selain itu, sistem pengupahan juga memainkan peran penting dalam mengurangi pengangguran. Dalam perspektif ekonomi Islam, upah dapat berupa apa pun yang bernilai ekonomis yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerjanya sesuai dengan pekerjaan mereka, tidak hanya uang. Oleh karena itu, persyaratan upah sama dengan persyaratan jual beli, berdasarkan pengertian transaksi jual beli (transaksi untuk mendapatkan manfaat dengan kompensasi). Islam memberikan solusi yang baik terhadap masalah upah dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa menindas kedua belah pihak. Masing-masing pihak menerima bagian yang adil dari hasil kerjasama tanpa menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak lain sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 yang artinya : “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan).” Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam suatu perjanjian (yang berkaitan dengan pengupahan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingannya sendiri (Ghofur, 2020).

Dalam ekonomi Islam, human capital atau modal manusia berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha. Modal manusia meliputi keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki individu, yang dapat berkontribusi pada produktivitas ekonomi dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan (Nazwa Akhaza Hani et al., 2025). Perspektif ini menekankan pentingnya modal manusia



tidak hanya untuk kemajuan pribadi tetapi juga untuk kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan dalam Islam pengembangan modal manusia bukan hanya sekedar penekanan pada pengembangan intelektual dan emosional, namun menyangkut pengembangan spiritual dan moral. Dalam mendistribusikan kekayaan, Islam menekankan prinsip keadilan dan persaudaraan. Nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan kasih sayang juga diperhatikan dalam menentukan upah. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, modal manusia tidak hanya dilihat sebagai alat produksi tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh populasi penduduk, upah minimum provinsi, dan human capital terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung tahun 2018-2024 dalam perspektif ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa secara parsial populasi penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung, dengan koefisien sebesar -0.057919 dan probabilitas $0.0011 (< 0,05)$. Hal ini bisa diartikan bahwa peningkatan populasi penduduk tidak selalu menjadi beban bagi pasar tenaga kerja, melainkan dapat menjadi potensi tenaga kerja produktif apabila dikelola dengan baik. Upah minimum provinsi juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung dengan koefisien sebesar -3.121572 dan probabilitas $0.0032 (< 0,05)$. Artinya dengan kenaikan upah minimum, jika diterapkan secara bijak oleh pemerintah daerah dan disertai dengan pengawasan terhadap pelaku usaha, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan menurunkan angka pengangguran. Di sisi lain, human capital yang diukur melalui indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung, dengan koefisien 3.972250 dan probabilitas $0.3727 (> 0,05)$, yang mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung masih belum optimal dalam menyerap peluang kerja yang tersedia. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Sedangkan secara simultan populasi penduduk, upah minimum provinsi, dan human capital berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung dengan nilai f -statistic sebesar 7.804487 dan probabilitas $0.0000 (< 0,05)$. Dalam perspektif ekonomi Islam, hal ini menjadi perhatian penting karena prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial menekankan pentingnya distribusi kesempatan kerja yang merata serta pengembangan kualitas manusia secara holistik. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang produktif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen dan belum mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, atau kebijakan ketenagakerjaan yang juga dapat memengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, cakupan wilayah penelitian terbatas pada Provinsi Lampung, sehingga hasil temuan belum dapat digeneralisasikan ke provinsi lain yang memiliki karakteristik sosial ekonomi berbeda. Pengukuran human capital yang menggunakan IPM juga memiliki keterbatasan karena belum mencerminkan secara spesifik kompetensi atau keterampilan riil tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan serta memperluas cakupan wilayah agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan aplikatif.

REFERENCES

- Al-faridzi, S., Maidalena, M., & Yanti, N. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Investasi Asing, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Utara. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 8236–8250. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i6.3497>
- Ali, M. M. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian. *JPIB: Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd*, 1(2), 1–5. <https://ojs.stai-ibnurusyd.ac.id/index.php/jpib/article/view/8>
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian. *Pilar*, 14(1), 15–31.
- Anggraini, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2023). Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. *Tirtayasa Ekonomika*, 18(1), 123–138. <https://doi.org/10.35448/jte.v18i1.13613>
- Azzahro, I. K., & Prakoso, J. A. (2022). Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 314–327. <https://doi.org/10.46306/vls.v2i1.104>
- Cahyana, I., & Muliati, M. (2023). Pengaruh jumlah penduduk dan nilai upah minimum serta inflasi terhadap pengangguran di provinsi Kalimantan Timur. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25(1), 123–132. <https://doi.org/10.30872/jfor.v25i1.11985>
- Cynthia, D. A., & Hanifa, N. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pengangguran Usia Muda Di Pulau Jawa. *Independent: Journal of Economics*, 4(2), 1–11. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/view/60979>
- Doni, A. H., Alfiona, F., Andespa, W., & Al-Amin, A.-A. (2023). Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Kovensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 2(3), 1–10. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v2i3.20>
- Fahmi, M. P. (2022). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Kota Pekanbaru. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(4), 76–87. <https://doi.org/10.32938/jep.v4i4.3049>
- Faizah, U. N., & Woyanti, N. (2023). Analisis Pengaruh Pendidikan, Partisipasi Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Provinsi Banten Tahun 2011-2020. *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 6(1), 48. <https://doi.org/10.61689/bisecer.v6i1.386>
- Firdaus, M. M. (2021). Metodologi penelitian kuantitatif; dilengkapi analisis regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0. CV.



Dotplus Publisher.

- Fuadi, F. (2022). Peran Ekonomi Dan Keuangan Islam Pasca Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 1, 71–85. <https://doi.org/10.58561/margin.v1i2.40>
- Garnella, R., Wahid, N. A., & Yulindawati, Y. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan kemiskinan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 21–35. <https://doi.org/10.22373/jimebis.v1i1.104>
- Ghofur, R. A. (2020). Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam. Arjasa Pratama.
- Hanif, Ermawati, L., & Sari, D. P. (2020). Analisis Pengaruh Budaya Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.24042/slm.v1i1.7024>
- Hanim, W. (2023). Peran Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 8(1), 132–139. <https://doi.org/10.33772/jpep.v8i1.314>
- Harahap, S. A. R., Azmi, M. U., & Syamsuri, S. (2021). Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Peran Sumber Daya Manusia. *Al-Mustashfa: Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.7305>
- Jamaluddin, M. A.-A., Santoso, A. S. P., & Ohoirenan, W. A. (2025). Peran Tingkat Kemiskinan Dalam Memediasi Pengaruh Upah Minimum, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 37–52.
- Juliani, W., & Kusuma, R. (2025). Tinjauan Yuridis Ketentuan Upah Minimum Sebagai Upaya Perlindungan Kesejahteraan Bagi Pekerja Atau Buruh Menurut Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. *Private Law*, 5(1), 167–177. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.5018>
- Kurnia, R. E., & Septiani, Y. (2021). Social and Economic Factors Determining the Unemployment Rate in the Bregasmalang Region 2010-2020. *Eko-Regional: Jurnal Pengembangan Ekonomi Wilayah*, 16(1), 63–73. <https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2021.16.1.1800>
- Lasiyama, M. (2022). *EKONOMI DAN BISNIS: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo (Vol. 2)*. Penerbit NEM.
- Mahendra, Y. I., Wahyudi, H., & Ciptawati, U. (2022). Pengaruh Populasi Penduduk, FDI dan Control of Corruption terhadap Emisi CO₂ di 9 Negara ASEAN. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(10), 3741–3753. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i10.1462>
- Maisyaroh, T. (2023). Inflasi dan Pengangguran Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1), 1–5. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3562/http>
- Margaretha, D., Purba, K. Y., Karo-karo, L. E., Mirnawati, M., Putri, N. K., & Suhariato, J. (2024). Pengaruh Human Capital dan UMR terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara Tahun 2004-2021. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(1), 300–312. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i1.136>
- Marliana, L. (2022). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 87–91. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.490>
- Mokodongan, L. V. G., Kumenaung, A. G., & Siwu, H. F. D. (2025). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Dan Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Minahasa Utara. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 670–686. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i1.100>
- Mouren, V., Lutherani Ch. P. A., & Tumangkeng, S. Y. . (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 133–144.
- Nailufar, F., Juliansyah, H., Murtala, & Risna. (2024). Pengaruh Upah Minimum Provinsi (Ump), Penanaman Modal Asing (Pma), Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia (Studi Kasus 11 Provinsi Ipm Lower Medium). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 7(1), 11–21. http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional
- Nazwa Akhaza Hani, Nikita Adelia Syafitri, & Raihana Azzahra. (2025). Peran Human Capital dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Sebuah Analisis Deskriptif. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 5(1), 91–102. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v5i1.3439>
- Nelmy Fitria Utami, Dea Marsa Amelia, Masna Ani Saputri, & Misfi Laili Rohmi. (2025). Pengaruh Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 3(1), 12–23. <https://doi.org/10.59024/jumek.v3i1.507>
- Nugraha, H. T., Muchtar, M., & Sihombing, P. (2023). Pandangan Model Dua-Sektor Lewis dan Model Solow terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ecoplan*, 6(1), 70–77. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i1.632>
- Pasuria, S., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Pengaruh angkatan kerja, pendidikan, upah minimum, dan produk domestik bruto terhadap pengangguran di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 795–808. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.94>
- Permadi, E., & Chrystanto, E. (2021). Analisa Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2018. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(2), 86–95. <https://doi.org/10.15642/oje.2021.5.2.86-95>
- Prawoto, A. T. (2017). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS. PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Purba, M. S., Samosir, S., Aritonang, K. B., Deleon, A., Sianturi, R., & Nugrahadi, E. W. (2025). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Angkatan Kerja Melalui Capaian Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Upah Minimum. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 264–276. <https://doi.org/10.37411/jjce.v6i1.3522>
- Puspasari, D. (2020). Analisis pengaruh pendidikan, kesehatan dan upah terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 65–76. <https://doi.org/10.14710/jdep.3.1.65-76>
- Qausar, N., & Aminda, R. S. (2022). Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau. *Journal Of Development Economic and Digitalization*, 1(1), 38–50.
- Rumatiga, F. F. B. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di



- Provinsi Papua Tahun 2013–2017. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/22856>
- Saputri, B., & Samsuddin, M. A. (2025). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin , Rata – Rata Lama Sekolah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku Tahun 2017–2023 (Pendekatan Data Panel). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(3), 338–351. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1592>
- Seran, S. (2020). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*. Deepublish.
- Siboro, S. R. J., Situmeang, R. U. M., Sihombing, O. K. J., & Pane, J. (2025). Pengangguran, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(3), 770–774.
- Sumilih, D. A., Pujiriyani, D. W., Jaya, A., Ras, A., Subiyantoro, A., Rianty, E., Rachmaningtyas, N. A., & Mesya, M. (2025). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=FHdcEQAAQBAJ>
- Suriani, N., & Jailani, M. S. (2023). Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Susilowati, D., & Adianita, H. (2023). Pengaruh Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 2(1), 77–98. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v2i1.57>
- Tarigan, B. P., & Arka, S. (2025). Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota DKI Jakarta. *Journal of Citizen Research and Development*, 2(1), 206–212. <https://doi.org/10.57235/jcrd.v2i1.4446>
- Wibisono, C. G. (2020). Pengaruh migrasi masuk, pendidikan dan upah minimum terhadap pengangguran terbuka di Kabupaten dan kota provinsi jawa timur. *Airlangga Development Journal*, 4(1), 83–105. <https://doi.org/10.20473/adj.v4i1.20170>